

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat mengalami masalah tata ruang. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan hunian yang juga naik pesat, terutama di Kota-kota besar. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintahan Kota Bandung untuk memenuhi kebutuhan bangunan hunian dengan terbatasnya lahan yang tersedia. Perencanaan yang buruk dapat berakibat pada munculnya permukiman kumuh dan tidak terencana, seperti yang terjadi pada Kampung-kampung Kota. Karena itu pemerintah Kota Bandung saat ini telah merencanakan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun di 13 titik di Kota Bandung. Sebagai solusi untuk penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan hunian layak yang bertujuan bagi masyarakat berpenghasilan renda (MBR).

Kota Bandung merupakan Kota yang dikelilingi oleh pegunungan, yang saat ini menjadi ancaman tersendiri bagi Kota Bandung diantaranya patahan Lembang dan gunung tangkuban perahu yang tidak pernah diketahui kapan akan terjadi ancaman tersendiri. Untuk mempersiapkan resiko tersebut hunian yang diharapkan mampu merespon itu semua khususnya resiko gempa bumi.

Dalam rencana pembangunan melalui Dinas Perumahan dan Kawasa Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Kota Bandaung terdapat beberapa isu kebijakan dan strategi diantaranya sebagai kota metropolitan dengan laju rata-rata pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi 1,4% pertahun, rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan renda terhadap rumah mencapai 47,5%, dan keterbatasan lahan kawasan pusat kota sehingga timbulnya lahan-lahan kumu ditengah kota.

Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023 dari tahun 2014 - 2017 sebanyak 7.520 unit. Akumulasi capaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4.978 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah di perbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan. sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui senergi program dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta (CSR), serta optimalisasi data base kebutuhan perumahan layak huni. Selain itu tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak huni dan sehat

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud.

Memberikan gagasan alternatif perancangan rusunawa tanggap akan bencana bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam konteks Rusunawa Rancacili Kota Bandung dengan menciptakan bentuk solusi penangaan secara fisik ataupun non fisik dan memberikan penyediaan sarana dan prasarana pada permukiman.

B. Tujuan.

1. Memberikan alternatif perancangan rusunawa tanggap akan bencana (gempah bumi) secara murah.
2. Memberikan gagasan penataan rusunawa tanggap akan menghadapi bencana yang akan datang.

1.3 Masalah Perancangan

- A. Perancangan tempat tinggal, hunian susun bagi warga Kota Bandung yang membutuhkan dengan pendekatan arsitektur tanggap bencana.
- B. Terdapat ancaman bencana bagi warga Kota Bandung diantaranya patahan lembang, dan gunung tangkuban perahu.

1.4 Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam perancangan rumah susun, di antaranya:

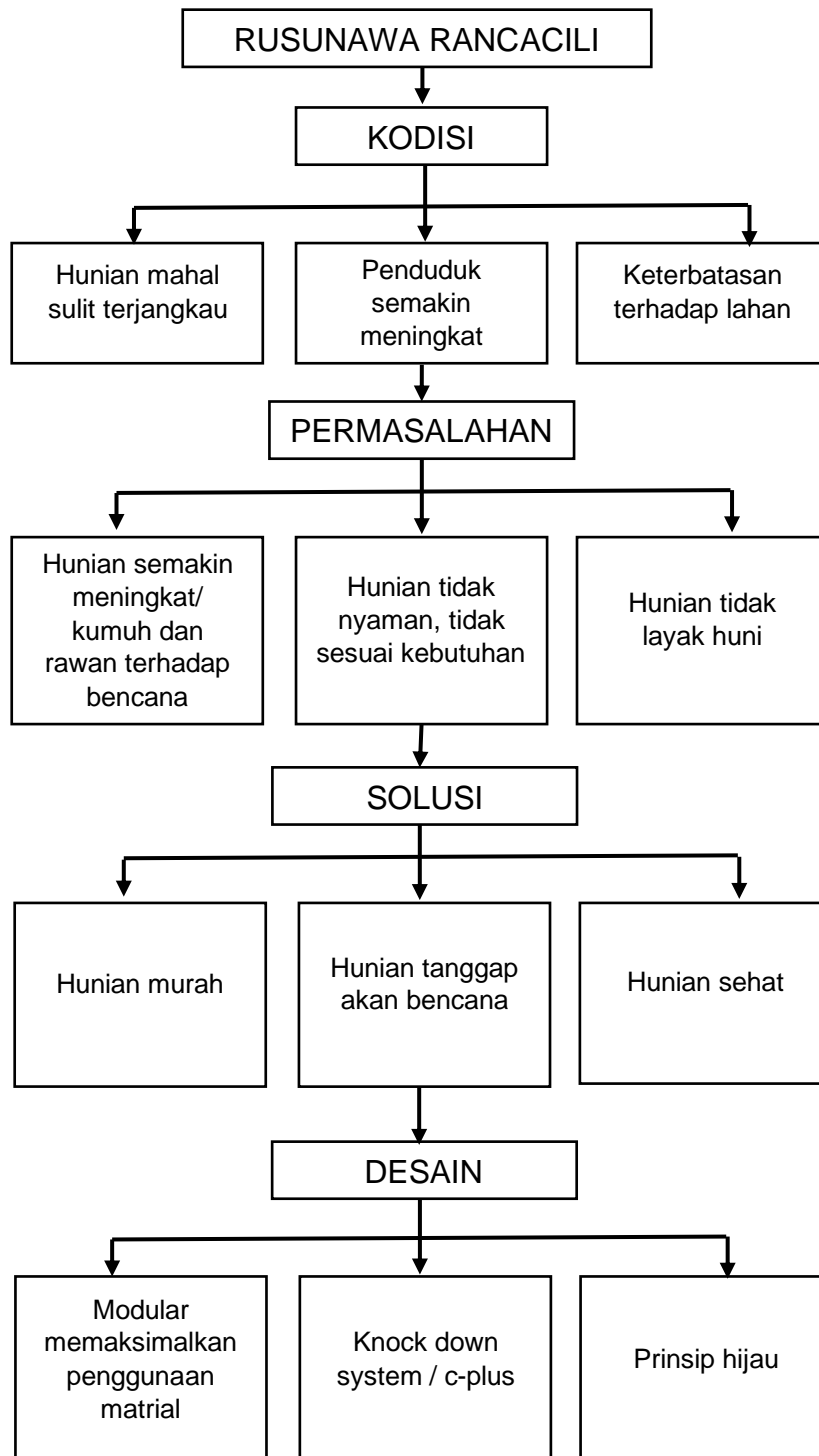
- A. Studi lapangan terhadap tapak, diantaranya kawasan sekitar (potensi, kekurangan, akses, dan lain-lain).
- B. Studi banding bangunan sejenis.
- C. Studi literatur mengenai, konsep dan tema sejenis.
- D. Peraturan, undang-undang, dan standar sebagai pedoman perancangan.

1.5 Lingkup Batasan Perancangan

Batasan dalam perancangan dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya:

- A. Batasan berdasarkan buku panduan tugas akhir UNIKOM.
- B. Batasan berdasarkan kategori desain.
- C. Batasan lahan yang dikerjakan 24.000 m².
- D. Batasan waktu, biaya dan fungsi yang disesuaikan terhadap desain.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematis Laporan

Sistematika pembahasan laporan pendahuluan ini terdiri dari 6 bab, dengan lingkup bahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN memuat tentang; latar belakang pemilihan proyek, permasalahan perancangan, maksud, tujuan, pendekatan perancangan, lingkup batas perancangan, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan laporan.

BAB II. DESKRIPSI PROYEK memuat tentang; deskripsi umum proyek, pemaparan judul proyek, pembahasan literatur, program kegiatan, kebutuhan ruang, studi banding proyek sejenis.

BAB III. ELABORASI TEMA memuat pengertian, interpretasi tema serta studi banding mengenai tema sejenis.

BAB IV. ANALISIS memuat proses penilaian terhadap objek yang dihasilkan dari data-data yang diperoleh pada tahapan pengumpulan data.

BAB V. KONSEP PERANCANGAN memuat tentang konsep perancangan yang akan diterapkan pada rancangan.

BAB VI. HASIL PERANCANGAN memuat hasil rancangan berupa produk-produk desain arsitektural yang telah dirancang berdasarkan tema dan konsep.